

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Teori TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA. Teori perilaku perencanaan (TPB) diusulkan oleh Icek Ajzen melalui artikelnya "*From intentions to actions: A theory of planned behaviour*" Berbagai temuan studi menunjukkan bahwa ada pertahanan terhadap korelasi kuat antara niat perilaku dan perilaku nyata, yang nantinya akan menjadi kelemahan TRA karena niat perilaku tidak selalu diterjemahkan ke dalam perilaku nyata. Karena niat perilaku tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku dalam situasi di mana kekuasaan individu atas perilaku terbatas. Ajzen memperkenalkan teori perilaku perencanaan (TPB) dengan menambahkan komponen baru, "kontrol perilaku yang dirasakan". Ajzen memperluas teori tindakan beralasan (TRA) mencakup terdiri dari perilaku non-sukarela untuk meramalkan niat perilaku dan perilaku nyata. Penambahan terbaru dari komponen ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan menggambarkan sejauh mana seseorang berpikir mereka mengendalikan perilaku tertentu.¹

Teori perilaku perencanaan (TPB) menunjukkan bahwa ketika individu percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan suatu tindakan secara efektif, mereka lebih cenderung berniat untuk melakukannya. Peningkatan kontrol perilaku terdiri dari *Self-efficacy* dan pengendalian yang digabungkan untuk menciptakan peningkatan kontrol perilaku yang diamati. *Self-efficacy* adalah keyakinan bahwa seseorang dapat berhasil melakukan suatu perilaku, atau tingkat usaha yang diperlukan untuk melakukan suatu perilaku. Pengendalian mengacu pada persepsi seseorang bahwa mereka secara individu memiliki kendali atas pelaksanaan suatu tindakan, atau jika dipengaruhi oleh variabel eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Jika seseorang lebih yakin bahwa mereka dapat melakukan

¹ Ajzen.Icek, "From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior," *Action Control*, 1985, 11–39.

tindakan tertentu secara efektif, maka mereka memiliki persepsi kontrol perilaku yang tinggi.²

Theory of planned behavior (teori perilaku terencana) Jika individu memiliki keinginan untuk berperilaku, maka perilaku itu akan terwujud. Menurut teori ini, tiga faktor fundamental berikut mempengaruhi niat yaitu: sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), persepsi pengendalian diri (*perceived behavioral control*).³

a. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*)

Sikap terhadap perilaku seseorang akan hasil dari suatu tindakan, maka sikap terhadap perilaku ditetapkan. (*behavioral beliefs*). *Belief* berkaitan dengan persepsi seseorang tentang diri sendiri dan lingkungan di sekitar mereka. Bagaimana cara mengidentifikasi keyakinan (*Belief*) Menurut Mahyani tentang perilaku terencana, keyakinan dapat diungkapkan dengan menghubungkan suatu perilaku yang kita antisipasi dengan berbagai keuntungan atau kerugian yang akan terjadi jika kita melakukan atau tidak melakukan perilaku itu.⁴

Konteks dalam penelitian ini masyarakat Desa Japan berkeinginan untuk melakukan pengelolaan desa wisata, jika masyarakat yakin bahwa mengembangkan desa wisata merupakan usaha yang menguntungkan bagi mereka, begitu sebaliknya jika niat masyarakat Desa Japan rendah, bila mereka mempresepektifkan mengelola desa wisata akan memberikan kerugian bagi mereka. Keyakinan yang positif ini dapat diasumsikan dengan tingkat religiusitas masyarakat Desa Japan, masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang tinggi mempresepektifkan mengelola desa wisata adalah usaha menguntungkan.

Sikap ini masih dipersepsikan oleh masyarakat umum sebagai pandangan seseorang yang mungkin akurat atau tidak, tergantung pada tingkat pendidikan seseorang. pendapat ini mungkin berkembang. Jadi disimpulkan bila

² Imam Ghozali M.Com, 25 Grand Theory (Semarang: Yoga Pratama, 2020), 107.

³ Yustina Chrismardani, "Theory Of Planned Behavior Sebagai Prediktor Intensi Berwirausaha," Jurnal Kompetensi 10, no. 1 (2016): 92–93.

⁴ Mahyarni, "Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)," n.d., 17.

persepsi masyarakat terhadap desa wisata baik, maka akan berdampak positif pula terhadap keinginan masyarakat untuk menjalankan desa wisata tersebut.

b. Norma subjektif (*subjective norm*)

Norma subyektif adalah perasaan atau keyakinan seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain dalam hidupnya untuk dia lakukan atau tidak lakukan. Hubungan antara sikap dan perilaku sangat kuat, keyakinan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap norma subyektif. Namun, keyakinan perilaku menentukan hubungan sikap perilaku yang akan dilakukan (*behavioral belief*), maka norma subyektif ditentukan oleh keyakinan seseorang berdasarkan pendapat orang lain (*normative belief*).⁵

Seseorang biasanya memahami bahwa tekanan sosial yang dialaminya akan meningkat jika orang lain menganjurkan untuk melakukan suatu kegiatan. Sebaliknya, jika orang lain tidak memiliki kendali atas sesuatu, tekanan sosial yang dialaminya cenderung berkurang.⁶ Misalnya seseorang bertemu dengan tetangga desa yang sudah mengembangkan desa wisata kemudian tetangga menjelaskan keuntungan menjalankan desa wisata, maka seseorang akan tertarik dan mendukung mereka untuk melakukan pengelolaan desa wisata.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam memotivasi minat seseorang untuk menciptakan pengembangan desa wisata.

c. Persepsi pengendalian diri (*perceived behavioral control*)

Persepsi kontrol perilaku yaitu seseorang tentang upaya yang dilakukan untuk melakukan tindakan tertentu. Perasaan yang terkait dengan perilaku kontrol ini berkaitan dengan pusat kendali. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan pribadi bahwa kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu bergantung pada usaha sendiri. Persepsi kontrol perilaku ini dapat berubah tergantung pada keadaan

⁵ Mahyarni, 17.

⁶ Ni Nyoman Anggar Seni, Ni Made Dwi Ratnadi, "Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi," E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 12 (2017): 4048.

dan jenis perilaku yang dilakukan.⁷ Adanya faktor pendukung sangat penting dalam pengendalian perilaku. Seseorang akan memiliki tujuan yang kuat jika memiliki pola pikir positif dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya.⁸ Misalnya, jika suatu masyarakat termotivasi untuk meningkatkan taraf hidupnya, maka dapat mengembangkan desa wisata sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan.

2. Desa Wisata

2.1 Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan desa yang memiliki potensi alam yang mendukung dan memiliki ciri khas budaya yang bisa dikembangkan serta dilengkapi fasilitas pendukung lainnya untuk kemajuan masyarakat atau wilayah tersebut.⁹ Desa wisata yaitu sebuah kawasan yang berkaitan dengan wilayah atau berbagai kearifan lokal (adat-istiadat, budaya, potensi), yang dikelola sebagai daya tarik wisata sesuai dengan kemampuannya, yang ditujukan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁰ Sedangkan Prasetyo mengungkapkan desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata

⁷ Mahyarni, "Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)," 17.

⁸ Ni Nyoman Anggar Seni, Ni Made Dwi Ratnadi, "Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi," 4049.

⁹ Ayu Multika Sari, Andy Fefta Wijaya, Abdul Wachid, "Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)," 767.

¹⁰ Putu Agus Prayogi, I Putu Bagus Suthanaya, Ni Luh Komang Julyanti Paramita Sari, "Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Dengan Konsep Green Economy Berbasis Masyarakat Lokal Di Era Pandemi Covid-19," 120.

yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.¹¹

Sedangkan menurut peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang pedoman program pemberdayaan masyarakat mandiri kepariwisataan mendefinisikan desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara akomodasi, atraksi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menjadi satu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Maka disimpulkan desa wisata itu desa yang memiliki potensi wisata dan didukung dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan wisata kemudian menyatu dengan tradisi setempat.¹²

2.2 Tujuan Desa Wisata

Berdasarkan Pasal 4 UU No 10 Tahun 2019 menjabarkan hal hal mengenai pembangunan pariwisata, pembangunan tersebut memiliki tujuan seperti berikut :¹³

- a. Meningkatkan pembangunan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Mengatasi pengangguran dan kemiskinan
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup

2.3 Komponen Desa Wisata

Ada beberapa komponen desa wisata, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Akomodasi

Akomodasi dikembangkan dari ide tempat tinggal penduduk itu sendiri dan berasal dari tempat tinggal penduduk masyarakat setempat. Biasanya terletak dekat dengan pemandangan alam yang menakjubkan.

- b. Atraksi

Rutinitas penduduk setempat serta tatanan lingkungan fisik desa yang memiliki potensi

¹¹T. Prasetyo Hadi Atmoko, "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman," *Media Wisata* 12, no. 2 (2014): 147, <https://doi.org/10.36276/mws.v12i2.209>.

¹² Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, *PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA* (Jakarta, 2011), 6.

¹³ Gamar Edwin, "Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Selatan Hilir Kabupaten Malinau" 3, no. 1 (2015): 163.

¹⁴ Nova Ayu Wardani, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus)," 2021, 28.

mengintegrasikan pengunjung sebagai pemain aktif dan tarian, bahasa, dan program lainnya.

c. Keunikan dan kelangkaan

Untuk menarik wisatawan, desa wisata mengembangkan ciri khas yang unik dan hubungan dengan organisasi atau komunitas yang memiliki rasa budaya yang kuat.

d. Peluang untuk berkembang

Peluang untuk pengembangan di bidang pariwisata, seni, dan budaya lokal, serta peluang untuk mengembangkan fasilitas dan infrastruktur dasar lainnya secara memadai. Hal tersebut karena ada tenaga pengelola, instruktur, pelaku di industri pariwisata, seni, dan budaya.

2.4 Kriteria Desa Wisata

Kriteria sebuah desa harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat memenuhi peruntukan desa wisata, antara lain:¹⁵

- a. Mempunyai potensi penduduk dan daya tarik
- b. Memiliki sumber daya manusia yang mendukung
- c. Fasilitas infrastruktur yang memadai dan yang dapat mendukung operasional terkait pariwisata
- d. Memiliki kerangka kerja pemerintahan dan organisasi yang mengelola
- e. Aksesibilitas kawasan berorientasi pada wisata

2.5 Syarat Desa Wisata

Persyaratan berikut digunakan sebagai dasar untuk menetapkan desa wisata:¹⁶

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk bepergian ke sana menggunakan berbagai pilihan transportasi.
- b. Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya yang dapat dijadikan daya tarik wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan penuh terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya

¹⁵ Ratri Kurnia Airin, "Pengelolaan Desa Wisata Oleh Pemuda Di Desa Wisata Kembang Madu Kelurahan Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung," 2019, 26.

¹⁶ Selamat Joko Utomo, Bondan Satriawan, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang," Neo-Bis 11, no. 2 (2017): 144.

- d. Keamanan di desa tersebut terjamin
- e. Tersedianya akomodasi, telekomunikasi, dan pengelola yang memadai

2.6 Potensi Desa Wisata

Potensi mengacu pada sesuatu yang memiliki kekuatan dan kapasitas untuk tumbuh lebih jauh. Jadi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, potensi desa mengacu pada kekuatan, kemampuan, dan kapabilitas yang dimiliki desa tersebut.¹⁷ Sedangkan menurut Iwan Nugroho Potensi pariwisata di suatu desa dipengaruhi oleh keragaman sosial budaya, lingkungan sekitar, dan aktivitas ekonominya. Hal tersebut mungkin bisa menjadi tujuan wisata masyarakat. Kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan dengan memajukan kehidupan sosial budaya, yang meliputi keragaman hayati (rumah dan tempat berteduh), kostum etnik (baju, pakaian, garmen), masakan (makanan dan minuman), kesenian, adat istiadat, nilai atau standar dan dinamika kehidupan.¹⁸

Pada pembahasan ini, secara umum potensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Potensi fisik

Potensi yang erat kaitannya dengan sumber daya alam yang sudah ada, diantaranya:¹⁹

- a. Lahan, lahan bukan hanya tempat menanam tanaman, selain itu juga merupakan pasokan mineral. Lahan memiliki beberapa jenis tanah cocok untuk menumbuhkan tanaman tertentu. Lahan juga digunakan sebagai sumber bahan tambang, batu bara, batu kapur, marmer, dan sebagainya.
- b. Tanah, Potensi tanah ini dipengaruhi oleh kesuburan tanah, mineral, dan kandungan mineral lainnya.

¹⁷ Ratri Kurnia Airin, "Pengelolaan Desa Wisata Oleh Pemuda Di Desa Wisata Kembang Madu Kelurahan Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung," 29.

¹⁸ Iwan Nugroho, Purnawan Dwikora Negara, Hefifa Rhesa Yuniar, "The Planning and the Development of the Ecotourism and Tourism Village in Indonesia: A Policy Review," *Journal of Socio Economics and Development* 1, no. 1 (2018): 49, <https://doi.org/10.31328/jсед.v1i1.532>.

¹⁹ Ratri Kurnia Airin, "Pengelolaan Desa Wisata Oleh Pemuda Di Desa Wisata Kembang Madu Kelurahan Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung," 30–31.

- c. Air, Pada pedesaan masih ada air bersih dan berlimpah di masyarakat. Air diperoleh dari tanah dengan menggunakan aliran atau mata air yang sudah ada untuk mengambil air dari bumi. Air salah satu sumber kehidupan yang dapat digunakan manusia dalam aktivitas sehari-hari.
- d. Manusia, dalam hal ini manusia digunakan sebagai sumber energi. Pada sebuah desa akan terdapat sebuah lahan yang membutuhkan tenaga dalam pengolahannya. Oleh karena itu, manusia adalah sumber daya terpenting dalam perkembangan suatu desa dilihat dari tingkat pendidikan seseorang.

2. Potensi non fisik

Potensi non fisik adalah potensi yang dimiliki desa/ kota dan berasal dari tindakan penduduknya. Potensi non fisik lainnya seperti organisasi desa, perangkat desa, tradisi desa, dan budaya desa. Penduduk desa yang telah lama hidup dapat mengembangkan cara hidup mereka sendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan setempat.²⁰

Sedangkan menurut Indah Permatasari mengartikan sebagai berikut: Rencana pengembangan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip religi, tradisi masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan kelestarian. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan wisata yang berkelanjutan.²¹ Berikut potensi non fisik desa:²²

- a. Masyarakat desa yang mempunyai rasa kekeluargaan dan gotong royong akan menjadikan sebuah landasan yang kokoh dalam masa pengembangan sebuah desa.
- b. Lembaga yang ada di masyarakat termasuk lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga komersial, lembaga sosial dan organisasi

²⁰ Ratri Kurnia Airin, 32.

²¹ Indah Permatasari, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, "The Model of Tourism Village Development in the District of Tabanan," *International Journal of Sociological Jurisprudence* 2, no. 2 (2019): 12, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sji>.

²² Ratri Kurnia Airin, "Pengelolaan Desa Wisata Oleh Pemuda Di Desa Wisata Kembang Madu Kelurahan Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung," 32–33.

mendukung masyarakat pedesaan dalam kegiatan sehari-hari mereka.

- c. Aparat desa dan pegawai pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan desa dengan mempromosikan kelancaran dan ketertiban di masyarakat. Misalnya, kepala desa, kepala komunitas, kepala adat, dan lain sebagainya.

2.7 Pengembangan Desa Wisata

Langkah pengembangan desa wisata juga ditangani oleh pemerintah desa yang menaungi desa wisata tersebut. Seperti yang dikatakan Aditya yaitu dalam rangka mengembangkan dan memberikan rangsangan positif bagi masyarakat agar mau dan mampu mandiri, maka daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota mengambil langkah strategis. Mereka memberikan fokus yang lebih faktual dengan mempertimbangkan aspek budaya yang melekat di kawasan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Hal tersebut menjadi cara paling efektif untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.²³

Pengembangan desa wisata menurut Anak Agung didukung dengan tiga faktor yaitu :²⁴

- a. wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih asli daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih mempraktekkan kebiasaan dan rutinitas budaya dan geografis yang cukup serasi..
- b. wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang lebih alami atau tidak terlalu terpengaruh oleh berbagai bentuk pencemaran dibandingkan dengan kawasan perkotaan.
- c. Pada tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang lebih lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya

²³ Aditya Eka Trisnawati, Hari Wahyono, and Cipto Wardoyo, "Pengembangan Desa Wisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal," *Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2018): 30, <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/>.

²⁴ Anak Agung Istri Andayani, Edhi Martono, and Muhamad Muhamad, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 1 (2017): 2, <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>.

masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan.

Pengembangan Desa Wisata harus memiliki aspek aspek untuk mendukung pengembangan desa wisata tersebut diantaranya:²⁵

1. Aspek Fisik

Aspek fisik adalah lingkungan kehidupan dalam suatu wilayah geografis dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang berdampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya. Beberapa sumber lingkungan fisik, antara lain :

- a. Geografi : luas wilayah yang digunakan sebagai objek wisata dan batas administratif serta batas alam.
- b. Topografi : tata letak dan kemiringan tanah, khususnya bentuk permukaan suatu wilayah.
- c. Geologi : jenis tanah, komposisi tanah, stabilitas, daya serap, erosi tanah, dan nutrisi tanah.
- d. Klimatologi : suhu atmosfer, kelembaban, curah hujan, kecepatan angin, energi matahari dan perubahan musim periodik.
- e. Hidrologi : Karakteristik pergerakan sungai, pantai, dan laut, seperti arus, sedimentasi, dan abrasi.
- f. *Visibility* : pemandangan di sepanjang jalan masuk, yang memiliki pepohonan di kedua sisinya.
- g. *Vegetasi and Wildlife* : daerah habitat merupakan faktor dalam kelangsungan hidup hewan dan flora.

2. Aspek Daya Tarik

Desa wisata dapat berkembang sebagai hasil dari keberadaan aset yang dapat menarik pengunjung dengan salah satu dari tiga cara diantaranya :

- a. *Natural Attraction*: berdasarkan fitur alamnya yang berbeda, seperti suhu, lingkungan, flora, dan satwa liar.

²⁵ Ardian Asro Hamdi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Putri Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes," 2018, 14–18.

- b. *Cultural Attraction*: berdasarkan pada tindakan manusia, termasuk sejarah, arkeologi, agama, dan kehidupan sekitar.
 - c. *Special Types Of Attraction*: kegiatan ini dibuat dan tidak ada hubungannya dengan dua kategori diatas sebelumnya. Jadi kegiatan ini buatan.
3. Aspek Ekonomi Sosial

Aspek ekonomi sosial masyarakat berkaitan dengan mata pencaharian penduduk, pendidikan masyarakat sekitar, dan penyebaran masyarakat dalam kependudukan. Hal ini perlu diperhatikan agar pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi lokal dan memberikan manfaat bagi perekonomian lokal.

2.8 Pengelolaan Desa Wisata

Terkait pengelolaan Desa wisata ada tiga faktor utama yaitu.²⁶

- a. Pemerintah sebagai fasilitator

Fasilitator merupakan pihak yang memberikan fasilitas baik berupa bantuan fisik, penyedia jasa dan sebagainya. Untuk melayani dan mempermudah aktivitas pengunjung oleh karena itu fasilitas sangat diperlukan.
- b. Swasta sebagai penyedia dan penyelenggara jasa.

Pihak swasta biasanya menawarkan jasa yang dibutuhkan para wisatawan seperti akomodasi. Akomodasi wisata merupakan bagian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berwisata, bentuk akomodasi bisa berupa penginapan.
- c. Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata

Masyarakat dapat berperan aktif ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreativitas dengan melibatkan diri dalam kegiatan perusahaan pariwisata serta keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan masyarakat.

²⁶ Armela Shintani, "Relasi Pemerintah Daerah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Di Kelurahan Sei Gohong," *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 9, no. 2 (2021): 31–32, <https://doi.org/10.37304/jispar.v9i2.1517>.

3. *Green Economy*

3.1 Pengertian *green economy*

Green economy merupakan sebuah ide baru yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial tanpa adanya resiko kerusakan alam.

²⁷ *Green economy* menerapkan konsep ekonomi baru yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam segala kegiatan pembangunan. *Green economy* biasa diartikan perekonomian yang rendah tidak menghasilkan emisi karbon dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu *green economy* adalah sebuah kegiatan ekonomi selain memiliki tujuan mensejahterakan rakyat dalam kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun keadilan untuk sumber daya alam itu sendiri. Hingga saat ini keputusan mengenai definisi *green economy* secara internasional belum ada kesepakatan antara pendapat yang disampaikan beberapa pihak dan lembaga skala internasional. Berbagai pendapat tersebut meliputi:²⁸

- a. *United Nation On Environment Program* (UNEP) mengatakan *green economy* mengacu pada sistem ekonomi yang menghubungkan produksi, konsumsi, dan distribusi produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang, dan tidak mengancam kondisi lingkungan saat ini atau masa depan.
- b. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mengatakan *green economy* adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan meminimalkan ketimpangan melalui berbagai cara, seperti menghindari masalah risiko lingkungan yang dapat

²⁷ Dewi Wungkus Antasari, "Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri," 83.

²⁸ Indarti Komala Dewi, dkk, Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012), Direktorat Lingkungan Hidup Deputi Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS) ISBN: 978-602-19802-2-4, 2013, 57.

mengakibatkan kelangkaan ekologi untuk generasi mendatang.

- c. *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD) mengatakan *green economy* adalah sistem yang dapat digunakan sebagai model untuk memaksimalkan kemungkinan sekaligus memajukan tujuan ekonomi dan lingkungan.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *green economy* memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan, memberi kesempatan ekonomi yang adil dan merata serta mengupayakan kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi dengan menyesuaikan sumber daya alam.

3.2 Ciri- ciri *Green Economy* :

Secara implisit ciri ciri dari *green economy* dapat dilihat dari:²⁹

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan di sektor hijau
2. Peningkatan investasi yang hijau
3. Pengurangan penggunaan sumber daya energi dalam proses produksi
4. Peningkatan pasar sektor hijau
5. Pengurangan konsumsi yang menyebabkan sampah

3.3 Prinsip-prinsip *green economy* :

1. Mengutamakan nilai guna yang berkualitas

Perlindungan lingkungan merupakan prinsip dasar dari *green economy* sebagai ekonomi pelayanan. Uang juga harus dikembalikan pada status sebagai sarana untuk memfasilitasi pembaharuan dari pertukaran, dari pada hasil akhirnya. Apabila hal ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan pada kegiatan ekonomi, maka kekuatan nilai uang pada seluruh kegiatan ekonomi dapat dikurangi.³⁰

2. Mengikuti aliran alam

Ekonomi bergerak bagaikan kapal yang berlayar dengan tiupan angin sebagai suatu proses yang alamiah. Tidak hanya dengan matahari dan energi hijau, tetapi juga dengan material lokal, flora

²⁹ Murniningtyas, "Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy," 20.

³⁰ Surna Tjahja dan Sutanto, *Demi Bumi, Demi Kita Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau* (Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013), 201.

daerah, dan jaring makanan, serta dengan proses hidrologi alami. Masyarakat menjadi lebih sadar secara ekologis, memungkinkan mereka untuk mendukung gagasan dan kegiatan bioregional dan menjaga keseimbangan antara batas pemerintah dan komersial serta batas ekosistem.

3. Makanan merupakan sampah

Alam tidak memahami sampah, jadi setiap produk dari suatu proses dimanfaatkan dengan baik oleh proses lainnya. Konsep ini membawa konsekuensi produk pendukung harus memadai dan tidak menimbulkan efek negatif agar dapat digunakan sebagai input kegiatan lainnya.³¹

4. Rapi serta keragaman fungsi

Jaring-jaring makanan yang kompleks adalah implikasi berbagai hubungan yang terintegrasi, dimana bertolak belakang dengan segmentasi dan fragmentasi masyarakat industri. Strategi pada setiap penyelesaian masalah bertumpu pada kepentingan bersama serta bernilai positif bagi kegiatan lain.

5. Keanekaragaman

Dunia sedang mengalami perubahan secara terus menerus, kesehatan dan stabilitas akan tergantung pada keanekaragaman. Hal ini berlaku untuk semua lapisan keanekaragaman masyarakat, serta berbagai spesies tumbuhan, makhluk hidup, lingkungan, dan wilayah geografis.³²

3.4 Pilar- pilar *Green Economy*

Green economy memiliki tiga pilar yaitu :³³

1. Pilar Ekonomi pada Teori *Green Economy*

Pilar ekonomi adalah indikator keberlanjutan pengelolaan yang paling. Langkah ini dapat memberikan energi bagi keberlangsungan kegiatan *stakeholder* dalam setiap interaksi, baik berupa nilai tambah, manfaat maupun keuntungan ekonomi lainnya. Manfaat lainnya diberikan kepada penduduk setempat serta pemerintah, sektor komersial, dan

³¹ Surna Tjahja dan Sutanto, 202.

³² Surna Tjahja dan Sutanto, 203.

³³ Murniningtyas, "Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep *Green Economy*,"

pendukungnya, serta wisatawan, untuk melestarikan lingkungan dan mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi.³⁴ Perekonomian ini bisa dilihat dari dua segi, yaitu mikro dan makro:

a. Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro dapat diterapkan dalam menelaah kegiatan pariwisata dalam *green economy* meliputi produk, kemasan, kualitas dan kuantitas serta pelaku dan harga. Ekonomi mikro juga mencakup bentuk-bentuk kewirausahaan yang saling berhubungan seperti kewirausahaan sosial, individu, dan pemerintah. Proses kewirausahaan individu melibatkan pemanfaatan pasar untuk menghasilkan barang dan jasa serta keuntungan finansial sambil memperhitungkan kegagalan pengusaha. Sementara sistem kewirausahaan sosial memungkinkan mereka yang memiliki keterbatasan memiliki kesempatan untuk berkembang dengan membebaskan mereka untuk mencapai kesejahteraan.³⁵

Hal ini biasanya diterapkan biaya dalam setiap objek wisata, misalnya biaya parkir, jasa spot foto, dan lainnya.

b. Ekonomi Makro

Studi ekonomi makro disini biasanya mencakup interaksi antara pendapatan, tenaga kerja, dan ekonomi. Pendapatan bisa diprediksi meningkat karena jumlah pengunjung meningkat.³⁶

2. Pilar Sosial pada Teori *Green Economy*

Aspek sosial tidak hanya mengidentifikasi *stakeholder* tetapi juga mengaturnya untuk memaksimalkan manfaat bagi mereka.

a. *Stakeholders*

Stakeholder disini adalah pihak-pihak yang saling terkait dengan kepentingan dalam suatu kegiatan tertentu masing-masing memiliki peran khusus untuk dimainkan, seperti pemerintah

³⁴ Iwan Nugroho, *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 52.

³⁵ Iwan Nugroho, 61.

³⁶ Iwan Nugroho, 64.

memainkan peran strategis dalam pengembangan kebijakan di berbagai industri wisata, perencana dan peneliti yang berfungsi sebagai sumber pedoman, atau output akademik yang berfungsi sebagai dasar pembentukan kebijakan. Selain itu, penentu utama keberhasilan suatu pembangunan ekonomi adalah jumlah pengunjung atau wisatawan. Penduduk setempat memiliki peran ganda dalam proses pengembangan kewirausahaan sebagai subjek dan objek, dan mereka juga berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi wisatawan. Interaksi antara penduduk lokal dan wisatawan akan membantu meningkatkan saling pengertian lintas budaya. Media massa sama pentingnya dengan jembatan karena akan menyebarkan informasi dengan cepat dan menarik khalayak baru.³⁷

b. Mengorganisasikan stakeholder

Tugas dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* harus dijalankan secara optimal. Keterlibatan awal, perencanaan, peningkatan partisipasi dalam program publik, pelaksanaan program, dan partisipasi pasca program adalah beberapa langkah dalam mengorganisir *stakeholder*.³⁸

Stakeholder dibagi menjadi tiga yaitu :³⁹

- *Stakeholder* Primer adalah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan langsung dalam kegiatan dan langsung terkena dampak baik dan buruknya suatu rencana
- *Stakeholder* Kunci adalah pemangku kepentingan yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan secara sah atau legal.
- *Stakeholder* Pendukung adalah pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu perencanaan,

³⁷ Iwan Nugroho, 84–90.

³⁸ Iwan Nugroho, 94–97.

³⁹ Fitri Handayani, Hardi Warsono, “Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang.”, 2.

tetapi memiliki kepedulian untuk ikut andil dalam proses pengembangan.

3. Pilar lingkungan pada Teori *Green Economy*

Pilar ini akan membahas bagaimana tindakan yang diambil oleh manusia dalam mempengaruhi lingkungan, termasuk:⁴⁰

- a. Pelestarian ekosistem hidup dan keanekaragaman hayati.
- b. Pemeliharaan lingkungan secara berkesinambungan.
- c. Pemanfaatan lingkungan dengan tetap menjaga kebersihan udara
- d. Pembangunan infrastruktur yang memperhatikan serapan air.
- e. Pengolahan limbah yang baik dan benar.

3.5 Transisi menuju *Green economy*

Transisi menuju *green economy* setiap daerah maupun negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia serta tingkat pembangunannya. Ruang lingkup *green economy* memiliki sebelas sektor utama yakni, bangunan, kota, pertanian, energi, air, perikanan, kehutanan, industri atau manufaktur, transportasi, pariwisata, dan limbah.⁴¹

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk membantu transisi menuju *green economy*, sebagai berikut :

a. **Pembangunan rendah karbon (*Low Carbon Development*) dalam *green economy***

Kegiatan Ekonomi harus bertransisi dari ekonomi tinggi karbon ke ekonomi rendah karbon. Pembangunan rendah karbon merupakan gagasan yang muncul dari pembahasan *United Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dalam pertemuan KTT Rio tahun 1992. Pada pertemuan tersebut, diputuskan untuk menggunakan *low emission development strategy* (LEDS) atau strategi pembangunan rendah emisi, sehubungan dengan gagasan tersebut, *green economy* yang dikembangkan

⁴⁰ Iwan Nugroho, *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 101.

⁴¹ Indarti Komala Dewi, dkk, *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012)*, 62.

kemudian digunakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Low emission development strategy* (LEDS) sering dikenal sebagai *low carbon development growth plan* (LCGP) yaitu rencana pertumbuhan pembangunan rendah karbon.⁴²

Gagasan pembangunan dengan sistem rendah karbon digunakan untuk memberikan gambaran luas tentang rencana pembangunan nasional atau strategi dimana pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada gagasan rendah emisi dan ketahanan iklim jangka panjang. Strategi dengan pendekatan *green jobs* digunakan untuk melakukan upaya pencapaian transmisi ekonomi rendah karbon. Pendekatan ini membutuhkan sejumlah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan industri yang rawan emisi, seperti manufaktur, konstruksi, atau instalasi, serta sektor lain yang menggunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan..⁴³

b. Efisiensi Sumber Daya (*Resource Efficiency*) dalam *green economy*

Efisiensi sumber daya adalah Efisiensi sumber daya adalah gagasan bahwa sumber daya alam dalam jumlah terbatas dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa menyebabkan masalah lingkungan. Hal tersebut memberi peluang untuk meningkatkan produksi dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya alam atau untuk meningkatkan nilai lebih dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya.⁴⁴

c. Inklusif secara sosial (*Sosial Inclusive*) dalam *green economy*

Inklusif secara sosial adalah keyakinan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama untuk hidup, bekerja, bermain, dan menerima perawatan dalam komunitas, tanpa memandang etnis, agama, atau

⁴² Indarti Komala Dewi, dkk, 28.

⁴³ Rachmawan Budiarto, A R Wardhana, and A Prastowo, "Implementation of Islamic Economics in Indonesia by Developing Green Economy through Renewable Energy Technologies," *Proceeding Of International Conference Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*, (2016): 9

⁴⁴ Indarti Komala Dewi, dkk, *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012)*, 29.

kategori lainnya. Tujuan dari inklusi sosial adalah untuk memperlakukan setiap orang dengan hormat dan menghormati kebutuhan dan perbedaan mereka untuk menciptakan masyarakat di mana setiap orang dapat hidup secara harmonis dan bermartabat.⁴⁵

Hasil dari interaksi sosial yang luas, *green economy* mempromosikan industri yang menghasilkan karbon yang relatif sedikit, menggunakan energi secara lebih efektif, dan bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, keterkaitan dengan inklusif sosial yaitu *green economy* menawarkan ringkasan proses pengambilan keputusan kolaboratif dan memasukkan keterlibatan masyarakat yang menghasilkan kehidupan yang lebih harmonis dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Inklusif sosial melalui *green economy* masih melibatkan investasi dalam proyek tanggung jawab sosial (*social responsibilities investment*), lapangan kerja hijau (*green job*), dan kota hijau (*green city*).⁴⁶

4. Pembangunan Berkelanjutan

4.1 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan rencana pembangunan lahan, bisnis, kota, masyarakat yang berprinsip pada “memenuhi kebutuhan hidup sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3, berbunyi bahwa pembangunan berkelanjutan adalah usaha yang disengaja dan terorganisir yang mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menjaga keamanan, keutuhan lingkungan, dan kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang.⁴⁷

Pembangunan berkelanjutan menekankan perubahan pada tiga bidang utama yaitu: tanggung jawab sosial, keuangan dan ekologi yang saling terkait dan bergantung. Pembangunan berkelanjutan memiliki dua arti, dalam arti sempit pembangunan berkelanjutan di

⁴⁵ Indarti Komala Dewi, et, 34.

⁴⁶ Indarti Komala Dewi, et, 35.

⁴⁷ Dewi Wungkus Antasari, “Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri,” 83.

fokuskan kepada komponen ekologis, sedangkan dalam arti luas pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai proses yang menunjukkan peradaban baru. Maka dari itu pembangunan berkelanjutan merupakan persyaratan yang objektif pada zaman sekarang.⁴⁸

Pembangunan berkelanjutan seperti yang diutarakan *United Nation On Environment Program* (UNEP) memiliki tiga aspek utama, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Selain itu pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan aspek tata kelola sebagai fasilitator untuk tercapainya tiga aspek pembangunan berkelanjutan.⁴⁹

Aspek sosial berkaitan dengan bagaimana manusia dan manusia lainnya berinteraksi dengan alam. Lingkup aspek sosial ini meliputi pemerataan kesejahteraan manusia, pemeliharaan kesehatan, perbaikan akses pendidikan, dan pemberi rasa aman. Selain itu, aspek sosial membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh.⁵⁰ Aspek ekonomi dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang intinya selaras dengan gagasan bahwa kemiskinan dapat diberantas, kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan, dan pemenuhan kebutuhan setiap manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin.⁵¹ Sedangkan Aspek lingkungan dalam gagasan pembangunan berkelanjutan hanya berorientasi pada keuntungan dan hanya diberi bobot parsial, sehingga belum menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lingkungan belum siap menjadi indikator yang mapan, berbeda dengan kemajuan di aspek sosial dan ekonomi.⁵²

⁴⁸ Olga Lavrinenko, dkk, "The Role of Green Economy in Sustainable Development (Case Study: The Eu States)," 1114.

⁴⁹ Murniningtyas, "Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy," 7.

⁵⁰ Murniningtyas, 9.

⁵¹ Indarti Komala Dewi, dkk, *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012)*, 7.

⁵² Murniningtyas, "Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy," 14.

4.2 Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip dasar elemen pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:⁵³

- a. Pembangunan Berkelanjutan Menghargai Keanekaragaman

Sumber daya alam harus selalu tersedia secara berkelanjutan untuk saat ini dan masa depan, pelestarian keanekaragaman hayati adalah suatu keharusan. Selain itu, keanekaragaman hayati adalah landasan sistem lingkungan yang stabil. Mempertahankan keanekaragaman budaya akan mendorong kesetaraan bagi semua orang dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adat istiadat peradaban yang berbeda.

- b. Pembangunan Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan Integratif

pembangunan berkelanjutan memprioritaskan interaksi manusia dan alam. Manusia memiliki dampak positif atau negatif terhadap alam. Keberlanjutan di masa depan hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan kesadaran pemahaman yang berkembang akan keterkaitan antara sistem sosial dan ekologi, dan menggunakan pemahaman ini sebagai landasan untuk metode pembangunan yang lebih integratif.⁵⁴

- c. Pembangunan Berkelanjutan Meminta Jangka Panjang

Pembangunan berkelanjutan memerlukan pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan asumsi umum diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Sudut pandang jangka panjang adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Tetapi saat ini kerangka jangka pendek telah mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi selama ini, sehingga harus diubah.

4.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Hasil utama dari konferensi Rio+20 yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 2012 adalah kesepakatan negara-negara anggota untuk

⁵³ Surna Tjahja dan Sutanto, *Demi Bumi, Demi Kita Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*, 65.

⁵⁴ Surna Tjahja dan Sutanto, 67.

memulai proses pengembangan satu set tujuan pembangunan berkelanjutan. 30 Negara yang diamanatkan dalam anggota Open Working Group (OWG) untuk menyusun proposal pembangunan berkelanjutan dari majelis umum PBB, OWG diresmikan pada tanggal 22 Januari 2013. Selama perjalanan penyusunan serangkaian usulan terkait pembangunan berkelanjutan dari negara-negara anggota OWG, tepat pada pertemuan ketiga belas dan terakhir di New York pada tanggal 19 Juli 2014, ada 17 tujuan yang diusulkan antara lain :⁵⁵

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan.
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan.
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara.
11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan.

⁵⁵ Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, and Utami Azalika. Rahmi, Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), Kajian Indikator Lintas Sektor (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), 12–13.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan samudra, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.4 Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam

Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, di dalam ajarannya mencakup berbagai tuntunan secara universal, memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur'an dan Hadist. Agama Islam memiliki ajaran yang mengatur keseimbangan secara baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Islam tidak memfokuskan pada urusan akhirat saja, tetapi mencakup semua dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, apa yang nanti diterima di akhirat adalah sebuah konsekuensi selama yang dilakukan di dunia semasa hidupnya. Untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang sempurna maka asas dasar sistem ekonomi Islam, tidak menjadikan akal manusia sebagai landasan epistemologis satu-satunya. Namun harus

menempatkan Al-Qur'an dan Hadist sebagai bagian utama.⁵⁶

Islam juga dikatakan sebagai agama yang lengkap dengan segala aturan aturan yang terkandung diantaranya dalam hukum, islam memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada dua cara yaitu dengan usul al fiqih, merupakan kumpulan atau kaidah yang digunakan dalam menganalisis dan menetapkan status hukum pada suatu permasalahan, biasanya disebut dengan metodologi islam dan cara kedua dengan maqashid syariah, yaitu berperan dalam menentukan ketetapan-ketetapan dalam mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan atau kemudharatan.⁵⁷

Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keperluan dasar manusia yang harus dipenuhi di dalam maqashid syariah karena pembangunan bentuk usaha dalam menciptakan kebaikan serta manfaat kepada manusia. Oleh karena itu pembangunan yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam maka kesejahteraan tidak mungkin tercapai. Apabila penerapan konsep ini dilakukan dalam sistem pemerintahan maka akan terwujud maslahat bukan hanya dari Umat islam, akan tetapi masyarakat keseluruhan akan merasakan.⁵⁸

Maqashid syariah berasal dari dua kata yaitu maqasih dan al syariah. Maqashid merupakan jamak dari bentuk tunggal dari kata maqshid serta maqshad yang artinya “tempat yang dituju atau tujuan akhir”. Sementara kata al-shariah secara etimologi adalah “agama, millah, metode” sedangkan secara terminologi adalah “aturan aturan yang telah disyariatkan allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (amaliyah). Pengertian diatas jika digabungkan adalah tujuan, target atau hasil akhir

⁵⁶ Sofi Mubarak, “Islam Dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan,” *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 3, no. 1 (2018): 139.

⁵⁷ Abdul Helim, “Maqasid Syariah Versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam),” 2019, 2.

⁵⁸ Sofi Mubarak, “Islam Dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan,” 142.

berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.⁵⁹

Maqashid syariah dibagi dalam beberapa aspek, jika dilihat dari aspek kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum dibagi menjadi tiga kebutuhan yaitu kebutuhan *al-dharuriyah* (Kebutuhan pokok), kebutuhan *al-hajiyah* (Kebutuhan sekunder) dan kebutuhan *al-tahsiniyah*. *al-daruriyyat* (Kebutuhan tersier). Apabila kebutuhan diatas tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan atau kemudharatan). Sehingga menyebabkan kehidupan manusia menjadi cacat, cedera bahkan sampai kematian. Oleh karena itu perlu adanya lima dasar hukum dalam memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁶⁰

Berikut penjelasan dari lima dasar hukum dalam maqashid syariah:⁶¹

1. *Hifdz al-din* (menjaga agama)

Agama islam banyak ajaran ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun islam, sehingga manusia yang telah melaksanakan bisa dikatakan menerapkan kehendak *al-shariah* dan memelihara agama.

2. *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa)

Upaya dalam memelihara jiwa dan keberlangsungan kehidupan. Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa dengan terpenuhinya makanan pokok, minuman dan pakaian serta tempat tinggal. Menjaga jiwa berkaitan dengan perlakuan diri akan sesuatu yang halal dan haram dalam agama. Karena sesuatu yang diharamkan oleh allah akan menimbulkan kerusakan jiwa, selain itu melakukan sesuatu yang halal maka hukumnya dalam penjaan jiwa.

3. *Hifdz al-aql* (menjaga akal)

⁵⁹ Abdul Helim, "Maqasid Syariah Versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)," 9.

⁶⁰ Abdul Helim, 12.

⁶¹ Abdul Helim, 24–28.

Akal merupakan bagian paling vital pada manusia, dengan adanya akal manusia dapat merasakan, membedakan dan mengetahui segala sesuatu pada dirinya dan diluar dirinya sendiri. Oleh karena itu manusia harus senantiasa menjaga akalnya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan Allah.

4. *Hifdz al nasl* (menjaga keturunan)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap manusia. Oleh karena itu keturunan sebuah kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan tersebut dalam islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan dari hubungan yang jelas sesuai negara dan agama. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperhatikan keberlangsungan hidup manusia.

5. *Hifdz al mall* (menjaga harta)

Harta apapun yang ada dialam semesta ini milik Allah, sementara harta yang berada di manusia hanya titipan yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Agar harta dapat dipertanggungjawabkan maka yang menggunakan harus sesuai dengan ketentuan dalam islam.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, sebelumnya penulis melakukan pengkajian dan menelaah terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Pengkajian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam memecahkan masalah dan menyusun tujuan penelitian yang akan dicapai. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengelolaan Desa wisata dan *green economy* serta elemen terkait lainnya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewi Wungkus Antasari Jurnal Ekonomi Pembangunan n Vol. 5,	Implementasi <i>Green Economy</i> Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri	Menyimpulkan bahwa Peningkatan jumlah pabrik di Kediri berbanding lurus dengan peningkatan volume limbahnya. Sampah kini telah menjadi masalah lingkungan utama yang akan memicu

	No.2 (2019)		<p>masalah lingkungan lainnya. Masalah lingkungan terjadi karena sampah yang berlebihan dan dapat menyebabkan banyak polusi lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan hambatan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya, dalam jangka panjang, pembangunan berkelanjutan di Kota Kediri tidak dapat dicapai karena hambatan lingkungan tersebut. Solusi ini dapat dilakukan dengan mengorganisir sampah dengan baik melalui program 3R (<i>reduce, reuse, and recycle</i>) sebagai penerapan konsep ekonomi hijau untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri.</p>
	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jenis penelitiannya yaitu kualitatif. ● Melakukan persamaan penelitian yaitu <i>green economy</i> dan pembangunan berkelanjutan. <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terletak pada lokasi penelitian di Desa Japan, sedangkan penelitian terdahulu berada di Kota Kediri. 		
2.	Ratri Kurnia Airin Skripsi 2019	Pengelolaan Desa Wisata oleh Pemuda di Desa Wisata Kembang Madu Kelurahan Kedu Kecamatan	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan desa wisata ini dirasa sudah mengalami perkembangan setelah pemuda ikut terlibat dalam setiap kegiatannya. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan, pemuda selalu berperan dan</p>

		Kedu Kabupaten Temanggung	berpartisipasi secara aktif . Karena dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dari rencana-rencana yang sudah dilakukan pemuda banyak memberikan inisiatif.
	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitiannya yaitu kualitatif. • Memiliki persamaan pada fokus penelitian yaitu desa wisata. Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Terletak pada lokasi penelitian di Desa Japan, sedangkan penelitian terdahulu berada di Desa Wisata Kembang Madu Kelurahan Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. 		
3.	Diana Dwi Susanti, Alif Muhammad Wicaksono	Membangun Ekonomi Hijau dengan Basis Pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018	menyimpulkan bahwa pertanian yang diusahakan oleh petani Jawa Tengah masih belum menggunakan konsep <i>green economy</i> . Penggunaan zat-zat kimia pada produk pertanian terus meningkat dengan berjalannya waktu. Sebagian besar produk pertanian Jawa Tengah masih mengandalkan pupuk kimia sebesar 78,05 persen
	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitiannya yaitu kualitatif. • Melakukan persamaan fokus penelitian yaitu ekonomi hijau (<i>green economy</i>) Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Terletak pada lokasi penelitian di Desa Japan, sedangkan penelitian terdahulu berada di Provinsi Jawa Tengah 		
4.	Ega Rusanti Skripsi 2021	Implementasi Maqashid Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis	<i>Islamic green economy</i> merupakan gagasan yang berupaya memadukan antara konsep-konsep penjaagaan dalam maqashid syari'ah dan <i>green economy</i> dalam usaha

		<i>Green Economy</i>	mencapai pembangunan berkelanjutan. Konsep ini terdiri dari tiga prinsip utama, yakni <i>how to deal with nature</i> ; <i>how to manage nature</i> dan <i>how to protect the nature</i> . PT. Unilever Indonesia Tbk memiliki strategi <i>Unilever Sustainable Living Plan (USLP)</i> yang selaras dengan prinsip dalam <i>islamic green economy</i> untuk mewujudkan tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Diantaranya upaya peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan, pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan kualitas hidup
	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitiannya yaitu kualitatif. • Melakukan persamaan pada fokus penelitian yaitu <i>green economy</i> dan pembangunan berkelanjutan. <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terletak pada lokasi penelitian di Desa Japan, sedangkan penelitian terdahulu tidak menyebutkan lokasi 		
5.	Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, Gustika Nurmalia Jurnal Akuntansi dan Pajak	Pengelolaan Desa Wisata dengan Konsep <i>Green Economy</i> dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada	Peneliti menyimpulkan Seluruh desa wisata telah melakukan pengelolaan dengan menerapkan konsep <i>green economy</i> . Akan tetapi pelestarian lingkungan menjadi isu utama dalam pengelolaan desa wisata. Pengelola tetap memperhatikan lingkungan alam agar tetap lestari dengan melakukan berbagai upaya secara optimal. Seperti misalnya dengan

		Desa Wisata Di Provinsi Lampung Dan Jawa Barat)	meminimalkan sampah yang dihasilkan, khususnya sampah plastik.
	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitiannya yaitu kualitatif. • Memiliki persamaan pada fokus penelitian yaitu desa wisata dan <i>green economy</i>. Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Terletak pada lokasi penelitian di Desa Japan, sedangkan penelitian terdahulu berada di Desa Wisata yang ada Provinsi Lampung dan Jawa Barat. 		
6.	Abd Rohman Taufiq, Richo diana Aviyanti Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 2, April 2022	Peran Jurusan <i>Green Economy</i> Dapat Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan	Menyimpulkan bahwa Peran jurusan <i>green economy</i> sangat membantu dalam mewujudkan kesejahteraan sumber daya alam yang dapat memberikan kontribusi keilmuan lingkungan. Oleh karena itu <i>green economy</i> sangat diperlukan di Indonesia. Tetapi sumber daya manusia Indonesia masih kurang memahami arti penting dari <i>green economy</i> .
	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitiannya yaitu kualitatif. • Memiliki persamaan pada fokus penelitian yaitu <i>green economy</i> dan pembangunan berkelanjutan. Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Terletak pada lokasi penelitian di Desa Japan, sedangkan penelitian terdahulu tidak menyebutkan lokasi. 		
7.	Ayu Multika Sari, Andy Fefta Wijaya, Abdul Wachid, <i>Jurnal Administrasi Publik (JAP)</i> ,	Penerapan Konsep <i>Green Economy</i> dalam Pengembangan Desa Wisata sebagai Mewujudkan	Menyimpulkan penerapan prinsip-prinsip <i>green economy</i> pada pengembangan Kampung Wisata Kungkuk belum diterapkan sepenuhnya. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Batu,

	2, no. 4	Pembangunan Berwawasan Lingkungan(studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)	dalam pembangunan bidang pariwisata, belum sepenuhnya diterapkan. Karena terdapat kendala dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, yaitu sumber daya manusia yang ada, fasilitas yang kurang lengkap.
<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jenis penelitiannya yaitu kualitatif. ● Memiliki persamaan pada fokus penelitian yaitu <i>green economy</i>. <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terletak pada lokasi penelitian di Desa Japan, sedangkan penelitian terdahulu berada di Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu. 			
8.	Djulianto Skripsi, (2022)	<i>Governance</i> dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan desa wisata sambi terdapat ketimpangan kolaborasi antara aktor dalam pengelolaan desa wisata sambi. Hal tersebut diketahui berdasarkan peran swasta sebagai aktor pemilik modal mendominasi pengelolaan destinasi wisata baik manajemen pengelolaan pariwisata maupun pengembangan atraksi dan akomodasi. Sedangkan Pemerintah belum banyak memainkan perannya selain sebagai pemilik lahan. Jadi masyarakat berkontribusi dalam bentuk tenaga untuk mengelola atraksi pihak swasta sehingga masyarakat dapat menambah pendapatan.
<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jenis penelitiannya yaitu kualitatif. ● Memiliki persamaan pada fokus penelitian yaitu 			

	<p>pengelolaan desa wisata.</p> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terletak pada lokasi penelitian di Desa Japan, sedangkan penelitian terdahulu berada di Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
--	--

Penelitian diatas dapat diuraikan bahwa pengelolaan desa wisata melalui *green economy* dapat mensejahterakan masyarakat karena menambah pendapatan mereka. Selain itu penerapan *green economy* memberikan solusi untuk mengurai sampah di Indonesia. Oleh karena itu sangat diperlukan negara Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Demikian perbedaan hasil penelitian terdahulu diatas dengan penelitian terbaru ini adalah tentang bagaimana pengelolaan Desa wisata Japan yang dilakukan Pemerintah Desa Japan dengan menggunakan pilar *green economy* sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir pada suatu penelitian dibuat untuk menjadikan penelitian dapat dipahami lebih mudah, baik serta lebih sistematis. Kerangka pikir menunjukkan alur-alur yang dimaksudkan sesuai dengan tujuan dan judul yang diangkat. Konsep *green economy* yang memiliki prinsip dasar *Low carbon, resource efficient dan sosial inclusive* serta memiliki tiga pilar yang sama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yaitu pilar ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sinkronisasi konsep tersebut mengacu pada pencapaian terhadap tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yakni memenuhi kebutuhan saat ini dengan tidak menyebabkan resiko kelangkaan dan tidak terpenuhinya kebutuhan di generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan sendiri terdiri atas tiga aspek utama yang menjadi tujuan yang harus dicapai yakni sosial, ekonomi serta perlindungan lingkungan.

Untuk mengetahui interpretasi pengelolaan desa wisata dengan penerapan *green economy* yang dilakukan di Desa wisata Japan Kec Dawe Kab Kudus dapat dianalisis melalui observasi dan wawancara. Laporan tersebut nantinya akan menyajikan beberapa pembahasan yakni; aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Secara garis besar, kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

